

# PARTISIPASI POLITIK KYAI NU DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010

Oleh:

**M. SYAMSUDINI**

Dosen STAIN Jember Jurusan Tarbiyah

## **Abstract**

*This research raises problems about NU priest (kyai) political participation in Banyuwangi Regional Election in 2010. The research subject is taken purposively. The purpose of this research is to describe the kinds of NU priest participation in their position as religion elite. This topic becomes interesting since there are many NU priests who directly and indirectly take part in politics which happened at Banyuwangi in 2010. Whereas, the priests have agreed that NU as a site of organization must be back to khithah as its fighting paradigm .*

*Theoretically, the analysis of the priests' participation in politics will be discussed through some theoretical approaches. This research applies and integrates the importance of a role considering individual as a back point to understand a social action. Nevertheless, methodologically, this research will take qualitative approach design as its portrays a dynamic social phenomenon.*

*The reserach concludes that in general social political situation and condition of Banyuwangi society in their regional election in 2010 can be described as follows: the people of Banyuwangi do not like violence, even when they are not of the same ideology, and if they have problems they will solve them in peace. The NU priests participation in Banyuwangi regional election in 2010 varies in forms: first, participation in giving vote in general election; second, participation as political party member; third, participaion as the social organization member; fourth, NU priests take part in youth organization training; and fifth, their involvement in festival, workshop, and multi party.*

**Kata kunci:** Partisipasi politik, kiai NU, Situasi dan kondisi sosial-politik, Pemilukada.

## **PENDAHULUAN**

Dalam perjalanan sejarah di Indonesia, para kiai dan pesantrennya telah melakukan misi keagamaan dan sosial-kemasyarakatannya melalui pesantren sebagai pusat kegiatannya. Hal ini dapat dibuktikan di lapangan sebagaimana dinyatakan oleh Kafrawi (1978: 18) bahwa pada setiap menjelang atau selesai shalat, Kiai mengadakan pengajian sekedarnya. Isi pengajian itu biasanya berkisar pada soal rukun iman, rukun Islam dan akhlak. Berkat caranya yang menarik dan keikhlasan serta perilakunya yang sesuai dan senafas dengan isi pengajiannya, lama-lama

jama'ahnya bertambah banyak dan mereka ikut meneladani perilaku Kiainya.

Studi-studi sosial tentang pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia (Geertz, 1959 dan Horikoshi, 1976) menunjukkan bahwa kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi sentral mereka itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang yang terdidik dan kaya di tengah masyarakat. Sebagai elite terdidik, Kiai memberikan pengetahuan Islam kepada para penduduk desa. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan transfer pengetahuan

kepada masyarakat desa tersebut. Dengan kekayaan mereka, di sisi lain, para Kiai menjadi patron, kepada siapa banyak penduduk desa bergantung. Posisi sentral Kiai dapat dilihat dalam pola patronase ini, terutama karena pola ini menghubungkan dan mengikat Kiai dengan para santri atau masyarakatnya (lihat Fox dan Dirjosanjoto, 1989).

Sebagai pemimpin Islam informal, Kiai adalah orang yang diyakini masyarakat mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Hal ini karena Kiai adalah orang suci yang dianugerahi berkah. Karena tips otoritas ini berada "di luar dunia kehidupan rutin dan profan sehari-hari" (Weber, 1973:53), maka Kiai dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Di samping kelebihan-kelebihan personalnya, otoritas Kiai ini dan hubungan akrabnya dengan anggota masyarakat telah dibentuk oleh kepedulian dan orientasinya pada kepentingan-kepentingan umat Islam dan masyarakat sipil pada umumnya.

Menurut Turmudi (2004:5), meskipun kepemimpinan Kiai telah mengalami perubahan akibat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat secara umum, namun ia juga terus mempengaruhi perkembangan umat Islam. Ada dua alasan yang menopang keadaan ini: pertama, Kiai secara tradisional adalah elite yang berpengaruh dalam umat Islam, kedua, Kiai adalah elite politik yang mempunyai pengaruh kuat terhadap sikap-sikap politik umat Islam baik di tingkat lokal maupun nasional, termasuk di kabupaten Banyuwangi

Eksistensi para Kiai NU di sini mulai sadar dan aktif terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan perpolitikan. Dan dalam menyikapi hal ini dimungkinkan banyaknya tokoh-Kiai NU yang ikut andil dan berpartisipasi dalam politik. Mereka secara sadar tanpa dipaksa turut serta dan bergabung dalam politik termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Dalam Pemilukada, kiai NU berpartisipasi

aktif mengusung dan mengawal kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah serta program-programnya yang mendukung dan membela kepentingan rakyat. Peluang ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para kandidat untuk menggandeng kiai NU sebagai vote getter (pendulang suara) rakyat. Semakin besar pengaruh seorang kiai NU, akan semakin banyak kandidat kepala daerah untuk menggandengnya. Proses perpolitikan semacam ini sering terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyuwangi.

Fenomena laris manisnya para Kiai NU dalam "pernikahan" politik pada Pemilukada Banyuwangi 2010 ini, menandakan bahwa budaya politik di Banyuwangi masih menggunakan *traditional-religio-political-system* (sistem politik tradisional berlandaskan keagamaan). NU memang memiliki modal besar, yakni keberadaan sistem teologi yang mengakar ke relung tradisi. Dalam *Religion and Political Development* (1970), Donald E. Smith menggambarkan model politik negara berkembang yang menggunakan agama sebagai sistem politik tradisional.

Studi tentang partisipasi Kiai NU dalam politik di Banyuwangi ini ditujukan untuk memperkaya studi-studi sosial keagamaan, khususnya tentang Kiai dan politik di Indonesia dan juga sebagai referensi bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Hal inilah yang menjadi alasan kunci bagi peneliti untuk membahas secara mendalam mengenai partisipasi Kiai NU dalam Pemilukada Banyuwangi tahun 2010.

Penelitian ini berusaha mengkaji partisipasi kiai NU dalam politik di wilayah Banyuwangi pada Pemilukada 2010 dengan fokus kajian: 1. Bagaimanakah situasi dan kondisi sosial politik masyarakat dalam Pemilukada Banyuwangi Tahun 2010?; 2. Bagaimanakah bentuk-bentuk partisipasi kiai NU dalam Pemilukada Banyuwangi Tahun 2010?.

Berdasarkan fokus kajian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Memperoleh gambaran umum tentang situasi dan kondisi sosial politik masyarakat dalam Pemilu pada Banyuwangi Tahun 2010; 2. Mengidentifikasi tentang bentuk-bentuk partisipasi kiai NU dalam Pemilu pada Banyuwangi Tahun 2010.

Manfaat utama dari penelitian ini adalah menghasilkan gambaran umum tentang partisipasi kiai NU, khususnya dalam lingkungan kajian ilmu sosial-keagamaan yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial politik NU sebagai sebuah organisasi kiai. Manfaat lain adalah menghasilkan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk-bentuk partisipasi kiai NU dalam koridor *jam'iyah ijtima'iyah*.

Sebelum peneliti paparkan metode penelitian dalam kajian ini, berikut dipaparkan terlebih dahulu kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait.

Sebuah studi menarik tentang Islam, terutama mengenai kiai Jawa, dilakukan oleh Geertz (1961) pada tahun 1960-an. Studi ini menarik perhatian, baik sarjana Indonesia maupun sarjana Barat yang tertarik dengan perkembangan Islam di Indonesia. Studi ini sangat signifikan karena ia telah meletakkan kerangka untuk memahami pengaruh politik kiai Jawa. Studi Geertz juga menjelaskan masalah-masalah politik Indonesia secara umum. Kendati demikian, studinya banyak dikritik oleh beberapa sarjana (lihat Pranowo, 1991). Woodward (1989), misalnya, berpendapat bahwa Geertz telah gagal dalam memahami sifat-sifat perkembangan Islam di Jawa. Sedangkan Hodgson (1974) melihat Geertz gagal karena ia terlalu dipengaruhi oleh perspektif muslim modernis.

Selain di atas, ada penelitian lain yang relatif masih baru yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Endang Turmudi (2004) dan

Imam Suprayogo (2007), kedua penelitian ini membahas tentang kiai dalam kaitannya dengan kekuasaan atau politik. Hanya saja berbeda setting sosialnya. Turmudi mengambil setting sosial kiai di Jombang, sedang Suprayogo mengambil setting sosial kiai di Gondanglegi Malang. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan fenomenologis, dan menghasilkan varian tipologi kiai yang berbeda-beda.

Sementara itu Ali Maschan Moesa (2007) dalam bukunya *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, berupaya memahami persepsi para kiai mengenai nasionalisme dalam konteks nasionalisme Indonesia, tentang bagaimana mereka mengkonstruksi nasionalismenya, masalah dasar-dasar konstruksi mereka, dan konteks yang melatarbelakanginya, serta apa maknanya bagi mereka. Kemudian bagaimana para kiai mengkonstruksi nasionalismenya pada era gencarnya gerakan kembali ke etnisitas, primordialisme keagamaan, dan komunalisme paska jatuhnya rezim Orde Baru. Selain itu ada kajian yang khusus membahas tentang partisipasi kiai dalam politik yang dilakukan oleh Aan Subiyanto yang mengkaji tentang Partisipasi Politik Tokoh Masyarakat Desa: Study Kasus di desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang menjelaskan bahwa partisipasi kiai merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki adanya suatu perubahan dan kebijakan yang diambil dalam pemerintahan yang berimbang langsung ke masyarakat.

Berdasarkan eksplorasi data yang pernah dilakukan oleh peneliti masih belum ada satupun penelitian yang secara khusus membahas tentang Partisipasi Politik Kiai Nahdlatul Ulama Dalam Pemilu pada Kabupaten Banyuwangi 2010, apa lagi dengan setting sosial masyarakat NU di wilayah Banyuwangi pada masa pelaksanaan pilihan Bupati Banyuwangi 2010-2015 yang akan berlangsung mulai bulan Mei s/d Juli 2010.

Penulis memilih Kyai NU di wilayah Banyuwangi ini sebagai fokus penelitian karena: *Pertama*: Di Banyuwangi, warga NU adalah warga mayoritas, bahkan NU Banyuwangi menjadi tolak ukur bagi perkembangan makro NU di Tingkat Wilayah Jawa Timur. *Kedua*, Seringnya Kyai NU Banyuwangi terlibat langsung dalam urusan politik, bahkan menjadi motor perubahan politik di tingkat nasional. Dan *Ketiga*, karena ketokohan kyai-kyai NU Banyuwangi yang mampu mengakar sampai pada basis yang paling bawah. Apalagi dengan adanya budaya politik di Indonesia yang masih menggunakan *traditional-religio-political-system*. NU memang memiliki modal besar, yakni keberadaan sistem teologi yang mengakar ke relung tradisi.

## METODE PENELITIAN

### Perspektif Penelitian

Menyesuaikan dengan persoalan yang diajukan, penelitian ini menggunakan paradigma **penelitian kualitatif** (Berg, 1998: 59, Alvesson, 2000: 12, Denzin, 2000: 189, Maunati, 2004: 50). Paradigma penelitian kualitatif tidak hanya berambisi mengumpulkan data, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif digunakan karena tema penelitian ini menitikberatkan pada kajian konseptual yang berupa butir-butir pemikiran dan bagaimana pemikiran itu tersosialisasi. Seperti disebutkan Bogdan dan Biklen (1982) diantara kunci pendekatan ini, pengungkapan makna (*meaning*) merupakan hal paling esensial, peneliti sebagai instrumen kunci dan adanya pendeskripsian fenomena atas objek.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai kompleksitas tindakan para kyai NU yang secara teoritik, penelitian ini mencoba memahami bagaimana keputusan individu dihasilkan dalam sebuah dialektika yang menempatkan agen sebagai motor pemberdayaan masyarakat.

Beberapa implikasi lebih jauh atas pendekatan kualitatif ini adalah, *pertama*,

informan diperlakukan sebagai individu yang berpartisipasi secara aktif dalam mengkonstruksikan realitas (Lincoln and Guba, 1995; Hammersley, 1995). *Kedua*, data dipahami sebagai hasil sebuah tindakan refleksif (Aveson and Skoldberg, 2000; Herts, 1996; Steier, 1991).

*Ketiga*, penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif yang memberi tempat penting bagi usaha untuk memahami dialektika di antara perspektif objektif-subjektif dan individual-kolektif. *Keempat*, memperhatikan bahwa pendekatan induktif yang bersifat refleksif merupakan strategi yang penting dalam penelitian kualitatif ini, maka pengutamaan pada perspektif informan adalah hal yang esensial dalam pengumpulan dan analisis data (Suparlan, 1994: 4, 14). *Kelima*, penelitian ini memperlakukan teori dan metodologi sebagai dua isu yang tidak dapat dipisahkan.

Pemilihan subjek yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan teknik purposif, dengan kriteria, yaitu: memiliki hubungan atau akibat secara langsung dengan partisipasi Kyai NU dalam politik di Banyuwangi. Berdasarkan kriteria ini, disusunlah sebuah daftar nama informan awal, yang mungkin nanti dalam perkembangan penelitian ini bisa ditambahkan atau malah bisa berkurang, sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Dalam pemilihan subjek ini, banyak hal yang menjadi pertimbangan. Seperti yang dikatakan oleh Oetomo (1995: 152), bahwa penelitian yang bersifat kualitatif itu akan mencoba dalam pengumpulan datanya berdasarkan pada pilihan dan kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya. Namun terkadang tidak semua orang itu siap diajak bekerjasama untuk kepentingan penelitian, bahkan mungkin akan mencurigai dan menolak kita, karena dianggap merugikan kepentingan kelompoknya. Oleh sebab itu penelitian ini akan dimulai dari subjek yang

dekat dengan peneliti, sesuai dengan apa yang disarankan oleh Patton (1994: 208-229), yakni penempatan informan dikaitkan dengan subjek penelitian.

### Data dan Unit Analisis

Data dari penelitian ini, bersumber dari pernyataan-pernyataan Kiai NU Banyuwangi, baik secara lisan maupun tulisan. Data ini merupakan data pokok atau utama. Di samping itu, tulisan orang tentang Kiai NU juga dijadikan data pendukung untuk mempertajam fokus masalah yang menjadi tujuan penelitian ini. Sedangkan satuan kajian atau unit analisis penelitian ini adalah wacana lisan dan tulisan dari hasil pemikiran Kiai NU dalam politik.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan melalui beberapa cara seperti wawancara yang panjang dan terbuka (*long open-ended interview*). Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung dan juga lewat telpon. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai masalah-masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan sumber data dari analisis bahan tertulis (dokumen-dokumen), baik itu berupa naskah-naskah diskusi, seminar, buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar skripsi, tesis dan penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya. Di samping itu pengamatan terlibat (*participant observation*) juga digunakan dalam penelitian ini, melalui sarana diskusi dan seminar yang dilakukan, dalam rangka memperkaya, mendalami dan memahami tema-tema sentral yang menjadi fokus kajian. Menurut Denzini (2000: 183) bahwa pengamatan berperan serta itu adalah strategi lapangan secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan subjek atau informan, partisipasi dan observasi langsung serta introspeksi. Dari sini bisa dilihat berdasarkan sumbernya, data utama kajian ini adalah data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dan tindakan atau perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian (Bogdan dan Taylor, 1984: 5, Borgatta, 1992: 1427). Dengan model ini diharapkan validitas data akan tetap terjaga.

### Analisa dan Keabsahan Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka penulis banyak menggerakkan analisis yang bersifat kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan (1984: 127), untuk membangun proposisi atau teori dapat dilakukan dengan analisis induktif. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan analisis induktif melalui beberapa tahap. Sebelum dianalisis, data yang terkumpul terlebih dulu dirumuskan kembali dalam bentuk tertulis. Setelah itu baru dilakukan analisis dan penafsiran data melalui langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, menelaah data; *kedua*, menyeleksi dan mereduksi data; *ketiga*, merinci dan mengklasifikasi data ke dalam tema-tema dan sub tema yang telah ditentukan; *keempat*, menyajikan data dalam bentuk catatan deskriptif; (Muhajir, 1996: 125, Moleong, 1991: 189-214); dan *kelima*, dilakukan pembahasan atau penafsiran data dengan menggunakan metode analisis komparatif (Moleong, 1991: 107-213), setelah itu dilakukan penarikan simpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1992: 50).

Selanjutnya pemeriksaan keabsahan data penelitian ini dilakukan melalui; (a) Observasi terus menerus, (b). Mencari kasus yang bertentangan (*negative case analysis*), (c). Melibatkan informan untuk mereview, (d). Mendiskusikan data dengan pihak-pihak tertentu, (e). Memeriksa kembali terhadap catatan lapangan, (g) Mencocokkan data pada subjek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Situasi dan Kondisi Sosial Politik Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi

Dari segi situasi dan kondisi sosial,

## Partisipasi Politik Kyai NU Dalam Pemihukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010

masyarakat Banyuwangi adalah masyarakat dengan tingkat keakraban, kerukunan, solidaritas, dan kerja-sama antar warganya yang relatif tinggi. Tentang hal ini, KH. Machfud Rosyid (Pedotan - Bangorejo), salah seorang informan, memberi penjelasan sbb :

a. Mengenai keadaan sosial masyarakat di Kabupaten Banyuwangi :

1. Kategori 1/2 terpelajar dan mudah diatur, rukun, tidak rewel, antara kiai NU satu dan lainnya tidak ada masalah.
2. Segi negatifnya masih ada beberapa masyarakat yang tidak memahami masalah pendidikan sehingga masih melakukan kegiatan diantaranya judi, sabung ayam, togel dan cap jie kie serta prostitusi, minuman keras dan narkoba.

b. Mengenai keadaan politik masyarakat di Banyuwangi :

1. Masyarakat di Banyuwangi tidak suka kekerasan, boleh beda partai tapi kerukunan tetap dijaga.
2. Walaupun tidak sama ideologi atau faham tetapi kalau ada masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Terkait dengan perilaku politik masyarakat KH. Machfud Rasyid menguraikan sebagai berikut :

a. Perilaku politik modern / tidak primitif

1. Tidak suka kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
2. Mendukung partai sendiri tetapi tidak berusaha menjatuhkan partai yang lain.

1. Tidak berfikiran kolot terhadap masalah yang berkaitan dengan permasalahan politik

b. Secara umum sudah paham politik yang ujung-ujungnya adalah mencari kekuasaan

1. Mencoba memahami secara lebih mendalam lagi, apa sebenarnya kekuasaan itu.
2. Berusaha mencari benang merah dari arti kata politik itu sendiri.
3. Antara satu dan yang lainnya rata-rata tahu apa arti ilmu kekuasaan.

c. Melihat paternalistik / kebapakan bukan melihat program tapi sosok

1. Mendukung apa yang menjadi pilihan hatinya tetapi bukan semata-mata melihat apa isinya / garis-garis termaktub di dalamnya.
2. Apa yang dijalankan dalam hal ini khususnya masalah yang berkaitan dengan politik, belum mendalami secara mendetail.
3. Sosok pemimpin di sini masih terasa diagungkan daripada apa yang menjadi program organisasi.

d. Tahu tentang politik dagang sapi / politik jual beli kekuasaan atau kontribusi.

1. Tahu kejelekan politik dagang sapi tapi tidak berusaha untuk menghilangkannya.
2. Terkesan membiarkan adanya hal yang semacam itu.
3. Sudah dianggap sebagai hal yang membudaya.

Itulah sekilas mengenai keberadaan masyarakat yang berada di Banyuwangi, baik dari segi sosial maupun dari segi politik. Perbedaan pilihan dan pandangan politik tidak mengakibatkan terjadinya permusuhan. Perbedaan semacam itu dianggap biasa saja. Dengan kata lain, perbedaan ideologi ataupun faham dalam politik tidak menimbulkan friksi dan konflik sosial.

### Partisipasi Politik Kiai NU Banyuwangi

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai

suatu kegiatan yang bersifat mengikuti secara langsung maupun tidak langsung mengenai jalannya proses politik yang menunjuk pada keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam proses politik diantaranya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah maupun kebijakan pemerintah. Partisipasi politik ini dapat merupakan suatu bentuk yang efektif yang dilaksanakan dan diambil alih oleh orang-orang yang mengikuti dunia perpolitikan secara aktif.

Bentuk dari keikutsertaan masyarakat ini dapat diupayakan melalui berbagai penyaluran aspirasi politiknya, tetapi tentu saja melalui prosedur yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Misalnya ialah ikut didalamnya dan berperan secara aktif menjadi anggota suatu partai politik. Kemudian setelah itu cara yang dilakukan untuk menyampaikan keinginan-keinginan itu dapat dilakukan dan ditujukan kepada lembaga legislatif, yang berada dalam pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Untuk menyalurkan aspirasinya tersebut dapat dilakukan dengan jalan sendiri-sendiri maupun dengan kelompoknya masing-masing.

### **Bentuk Partisipasi Politik Kiai NU Banyuwangi**

#### ***Pemberian Suara Kiai NU Dalam Pemilihan***

Dari hasil penelitian peneliti memperoleh data bahwa di masyarakat di Banyuwangi terdapat tiga aliran, ideologi, dan orientasi politik yang berbeda, yakni: nasionalis, nasionalis-religius dan religius. Ketiganya memiliki partisipasi politik aktif. Keaktifan mereka dapat diketahui melalui kecenderungan orientasi politik mereka. Dalam uraian berikut peneliti mencoba menyederhanakan orientasi politik mereka dalam beberapa aliran politik.

Dari masing-masing aliran ini yang paling dominan itu umumnya masuk dalam partai yang berbeda-beda dan tergolong nasionalis

cenderung menggabungkan diri pada partai PDI-P, Demokrat, Gerindra, Hanura, Republikan dan Golkar. Sedangkan kelompok religius cenderung ke partai PPP, PKS, PBR dan PBB. Lain halnya yang tergolong religius nasionalis, maka lebih berorientasi pada partai seperti PKNU, PAN dan PKB.

#### ***Keanggotaan dalam Partai Politik***

Bentuk partisipasi politik ini dinilai oleh kiai NU sebagai bentuk yang paling efektif dalam menyalurkan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, kiai NU bebas untuk menentukan aspirasi dan partisipasi politiknya. Di antara para kiai NU memang sudah mempunyai komitmen untuk menentukan partai politik pilihannya tanpa harus terpengaruh oleh ajakan dari pihak lain untuk ikut-ikutan dalam memberikan dukungan serta menyalurkan partisipasi politiknya pada segelintir partai. Karena pada dasarnya orde reformasi merupakan bentuk kebebasan untuk memilih salah satu partai politik yang disukai dengan penuh kesadaran yang mendalam yang lahir dari nuraninya sendiri. Artinya tidak harus bahwa para kiai NU yang kelihatannya rukun dan kondusif lantas secara bersama-sama masuk dan memilih partai yang sama. Hanya saja memang masyarakat merupakan masyarakat yang akrab dengan kerukunan dan selalu menjaga terciptanya suasana yang aman damai dan kondusif.

#### ***Keterlibatan Kiai NU dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan***

Keterlibatan kiai NU dalam kegiatan organisasi mewujud dalam bentuk keikutsertaan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sendiri. Dalam wawancara dengan peneliti, para kiai NU menyatakan lebih memilih organisasi yang menurut mereka lebih mengedepankan ajaran – ajaran *ahlussunnah wal jama'ah*. Terhadap selain organisasi yang lebih mengedepankan ajaran – ajaran *ahlussunnah wal jama'ah*, mereka cenderung menghindari bahkan *apriori*.

### **Keterlibatan Kiai NU dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan**

Hasil wawancara peneliti dengan KH. Ali Makki Zaini selaku Kiai NU Banyuwangi menunjukkan bahwa para kiai muda NU sering melakukan pembinaan pada organisasi kepemudaan, di antaranya: Gerakan Pemuda Ansor, Klub Sepak Bola Pesantren NU, Pagar Nusa, Fatayat NU, IPPNU dan IPPNU.

Organisasi-organisasi kepemudaan ini merupakan organisasi yang mewarnai pola hidup pemuda sebagai generasi penerus. Dengan adanya organisasi seperti ini diharapkan tergali potensi-potensi para pemuda yang menjadi anggota organisasi kepemudaan tersebut.

### **Keterlibatan Kiai NU dalam Pawai, Lokakarya dan Multi Partai**

Bentuk-bentuk dukungan yang diberikan pada seseorang atau partai yang menjadi pilihannya, menurut KH. Ali Makki Zaini, meliputi kegiatan pawai, lokakarya dan multi partai. Walaupun demikian, tidak kesemu orang yang menjadi simpatisan bisa dikatakan mendukung partai itu dengan sebenar-benarnya. Hal itu disebabkan karena sifat partai politik yang dipandang hanya merupakan wadah atau wahana penyaluran aspirasi dan partisipasi politik, tetapi tidak bisa menjamin atau memastikan serta memaksa seseorang untuk ikut dan masuk didalamnya.

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Masyarakat di Banyuwangi tidak suka kekerasan, boleh beda partai tapi kerukunan tetap di jaga. Walaupun tidak sama ideologi atau faham tetapi secara spesifik atau luasnya kalau ada masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan,

*Kedua*, Bentuk-bentuk partisipasi kiai NU dalam Pemilukada Banyuwangi Tahun 2010, antara lain: (1) Partisipasi Pemberian

Suara dalam Pemilihan Umum, (2) Partisipasi sebagai anggota Partai Politik (3) yaitu, Partisipasi sebagai anggota Organisasi Sosial kemasyarakatan, (4) Keterlibatan Kiai NU dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan, (5) Keterlibatan Kiai NU dalam Pawai, Lokakarya dan Multi Partai

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gabriel A. Almond, *Partisipasi Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982
- Greetz, C., 1961. *The Religion of Java*. Glencoe: The Free Press.
- , 1959a. "The Javanese Kyai: The Changing Role of Cultural Broker", dalam *Comparative Studies in Society and History*, (2):250-256
- , 1973. "Religion as a Cultural System", dalam *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Book.
- , 1959b. "The Javanese Village", dalam G William Skinner, (ed.). *Local Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*. Yale University Cultural Report Series, Southeast Asian Studies.
- Hefner, Robert W. 1987. "Islamizing Java?: Religion and Politics in Rural East Java", dalam *The Journal of Asian Studies*, 46 (3): 533-553.
- Hertz, R., Ed., 1996, "Introduction: Reflexivity and Voice", *Qualitative Sociology*, 19: 3-9.
- Holton, R., 2001, "Symbolic Interaction at the End of the Century", dalam Ritzer, G. and Smart, B., *Handbook of Social Theory*, London: Sage publications
- Horikoshi, Hiroko, 1976, "A Traditional Leader in a Time of Change: The Kyai and Ulama in West Java". *Disertasi Doktor*, University of Illinois,
- Ismail SM. 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, LKIS, 1991
- Mansurnoor, 1990, *Islam in an Indonesian*

- World, Ulam of Masura*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Martin Van Bruinessen, *Tradisi Relasi-relasi Kekuasa dan Pencarian Wacana Baru*, LKIS, Yogyakarta, 1999
- Maxweel, Joseph A. 1996. *Qualitative Research Design an Interactive Approach*. California: Sage Publication.
- Miriam Budiardjo, 1985, *Masalah Kenegaraan*, Jakarta, PT. Gramedia
- Neuman. W.L., 1997, *Sosial Research Method: Qualitative and Quantitatif Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Rifa'i, Ahmad. 2005. Islam sebagai Kambing Hitam. Dalam *Media Indonesia* tanggal 02-04. Sila e-mel KV di [vidya@tm.net.my](mailto:vidya@tm.net.my)
- Schlegel, Stuart S. 1977. *Grounded Research di dalam Ilmu-ilmu Sosial*. Aceh: PLPIIS.
- Selo Sumarjan, 1982, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Jakarta, Gramedia
- Sparringa, Daniel, 2002, "Analisis Wacana: Sebuah Pendekatan untuk Kajian Sosial Budaya, *Prasasti*, Jurnal Ilmu dan Seni Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, No. 45/ Tahun Xii/Mei 2002.
- Suprayogo, Imam, 2007, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, Malang: UIN Malang Press.
- Turmudi, Endang , 2004, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta.: LkiS.

**Partisipasi Politik Kyai NU Dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010**